



PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2026

KANTOR BUPATI GRESIK

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2025





PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2026

KANTOR BUPATI GRESIK

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2025





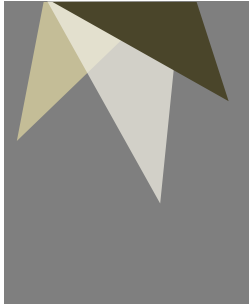
**PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK**

**Judul : RENCANA AKSI TAHUNAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK - TAHUN 2026**

Penanggungjawab:

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik

2025



kata pengantar



Dengan memanjatkan syukur ke hadirat *Allah subhanahu wa ta'ala*, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-*Nya*, sehingga penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik ini dapat terselesaikan. Dokumen Rencana Aksi Tahunan ini merupakan penjabaran dari dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kabupaten Gresik untuk tahun 2026.

Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan (RAT PK) Kabupaten Gresik ini pada intinya berisikan strategi, program dan kegiatan hingga sub kegiatan yang hendak di capai dalam penanggulangan kemiskinan pada dimensi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan. Termasuk juga lokasi prioritas berdasarkan kecamatan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah turut serta secara aktif dalam proses penyusunan dokumen RAT Penanggulangan Kemiskinan ini kami mengucapkan terima kasih, semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat digunakan menjadi dasar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang lebih memihak kepada masyarakat miskin di Kabupaten Gresik.

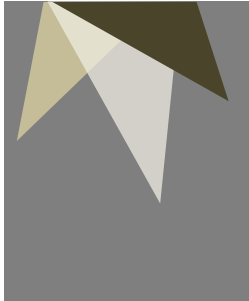
Gresik, 15 September 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Selaku
Sekretaris TKPK Kabupaten Gresik

EDY HADISISWOYO, S.H., M.M

Pembina Utama
NIP. 19680503 199703 1 011





daftar isi

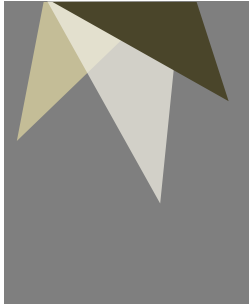
DAFTAR ISI

	Halaman:
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Singkatan	vi
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran	3
1.3. Landasan Hukum	4
1.4. Sistematika	8
Bab II Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun Sebelumnya ..	10
2.1. Kondisi Umum Kemiskinan Kabupaten Gresik	10
2.2. Kondisi Capaian Indikator Bidang terkait Isu Kemiskinan ...	14
2.3. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2024	16
Bab III Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun Berjalan	19
3.1. Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan	19
3.2. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik	25
3.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025	27
Bab IV Rencana Aksi Tahunan	31
4.1. Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2026	31
4.2. Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2026	38



4.3. Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2026	40
Bab V Penutup	74
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	





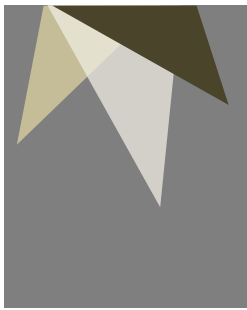
daftar tabel

DAFTAR TABEL

Halaman:

Tabel 2.1. Perkembangan Capaian Indikator Kemiskinan Non Konsumsi, Tahun 2020-2024	14
Tabel 2.2. Rekapitulasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2024	17
Tabel 3.1. Rekapitulasi Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik 2025	29
Tabel 4.1 Matriks Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2026 (sumber pembiayaan dari APBD Tahun Anggaran 2026)	42
Tabel 4.2 Rekapitulasi Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2026 (sumber pembiayaan dari APBD Tahun Anggaran 2026)	73



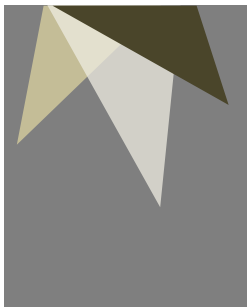


daftar gambar

DAFTAR GAMBAR

	Halaman:
Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Kab. Gresik Tahun 2015-2024	2
Gambar 2.1. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik, Tahun 2020-2024	10
Gambar 2.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik, Tahun 2020-2024	11
Gambar 2.3. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Gresik, Tahun 2020-2024	12
Gambar 2.4. Perkembangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gresik, Tahun 2020-2023	13
Gambar 3.1 Sasaran Makro Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024	20
Gambar 4.1 Konsep Pentahelix dalam Penanggulangan Kemiskinan	36
Gambar 4.2 Sebaran Lokasi Prioritas berdasar Jumlah Individu Miskin	39
Gambar 4.3 Sebaran Lokasi Prioritas berdasar Jumlah Keluarga Miskin ..	40





daftar singkatan

DAFTAR SINGKATAN

AKB	: Angka Kematian Bayi
AKABA/AKBA	: Angka Kematian Balita
AKI	: Angka Kematian Ibu
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
APtS	: Angka Putus Sekolah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ART	: Anggota Rumah Tangga
BDT	: Basis Data Terpadu
BPNT	: Bantuan Pangan Non-Tunai
BPS	: Badan Pusat Statistik
BP Taskin	: Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Inpres	: Instruksi Presiden
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KIS	: Kartu Indonesia Sehat
KKS	: Kartu Keluarga Sejahtera
KRTP	: Kepala Rumah Tangga Perempuan
LP2KD	: Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
P3KE	: Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
PBDT	: Pemutakhiran Basis Data Terpadu
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto



Perpres	: Peraturan Presiden
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PKH	: Program Keluarga Harapan
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PoU	: <i>Prevalence of Undernourishment</i>
PPFM	: Program Penanganan Fakir Miskin
PPLS	: Pendataan Program Perlindungan Sosial
RAD	: Rencana Aksi Daerah
RAT	: Rencana Aksi Tahunan
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPKD	: Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
RT	: Rumah Tangga
RTM	: Rumah Tangga Miskin
RTSM	: Rumah Tangga Sangat Miskin
RTLH	: Rumah Tidak Layak Huni
Ruta	: Rumah Tangga
SD	: Sekolah Dasar
SDG's	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDKI	: Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SUSENAS	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
TKPK	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka





PENDAHULUAN

dokumen

RAT PK 2026 Kab. Gresik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

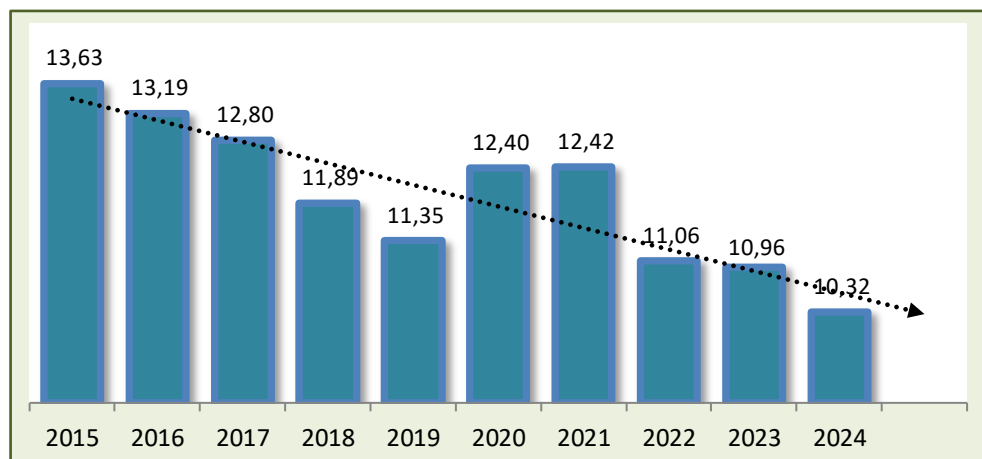
Kemiskinan menjadi masalah serius yang sulit terurai bak lingkaran setan. Benih-benih kemiskinan terus tumbuh dan berkembang di antara ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Mirisnya, kondisi ini merupakan potret rakyat kecil di Indonesia. Mereka tertatih-tatih membiayai hidup yang semakin mahal di tengah himpitan ekonomi dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

Dalam menghadapi persoalan kemiskinan, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, melalui program penanggulangan kemiskinan berupa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Kabupaten Gresik sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menghadapi persoalan-persoalan kemiskinan telah menunjukkan capaian-capaian yang signifikan, dimana salah satunya adalah capaian perkembangan persentase penduduk miskin berdasar garis kemiskinan yang berfluktuasi dengan capaian tahun 2024 turun terhadap capaian tahun 2023, dan menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan tren menurun selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, dimana pada tahun 2015 persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 13,63 persen dan pada tahun 2024 turun menjadi sebesar 10,32 persen.

Gambar 1.1

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik, Tahun 2015-2024



Sumber: Publikasi BPS. data di olah.

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik, maupun program-program yang pendanaannya *sharing* dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, dengan sasaran penerima manfaat adalah individu/rumah tangga miskin di Kabupaten Gresik.

Sebagaimana amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Kabupaten Gresik pada tahun ini juga telah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode Tahun 2025-2029. Dan sebagai tindak lanjut dari telah disusunnya dokumen RPKD tersebut, maka perlu disusun dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan (RAT PK) Kabupaten Gresik.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran.

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan (RAT PK) Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RAT Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik adalah memberi pedoman/acuan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun program/kegiatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan dokumen RAT Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini adalah terumuskannya program, kegiatan dan sub kegiatan berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik tahun 2026.

1.3. Landasan Hukum.

Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan (RAT PK) Kabupaten Gresik Tahun 2026 mengacu pada regulasi-regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pem-bangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4844) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor), yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembar Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 14, Noreg Peraturan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 405-14/2019, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kriteria dan Mekanisme Penetapan Penduduk Miskin di Daerah;
17. Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/399/HK/437.12/2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024.

1.4. Sistematika.

Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan (RAT PK) Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan sistematika:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun
 Sebelumnya.
- Bab III Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun Berjalan
- Bab IV Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan
 Tahun 2026
- Bab V Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah



PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN SEBELUMNYA

dokumen

RAT PK 2026 Kab. Gresik

BAB II PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN SEBELUMNYA

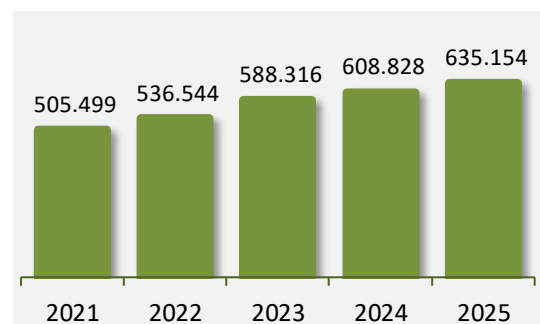
2.1. Kondisi Umum Kemiskinan Kabupaten Gresik.

2.1.1. Garis Kemiskinan.

Dasar penghitungan jumlah penduduk miskin di hitung menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yaitu besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum (konsumsi minimum). Besaran rupiah tersebut untuk selanjutnya disebut dengan garis kemiskinan, yang merupakan kumpulan titik potong (*cut off points*) dari kelompok miskin dan tidak miskin.

Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Gresik selama tahun 2021-2025 sebagaimana disajikan gambar di samping yang menunjukkan bahwa garis kemiskinan selama kurun waktu tersebut

Gambar 2.1
Perkembangan Garis Kemiskinan
Kabupaten Gresik, Tahun 2021-2025



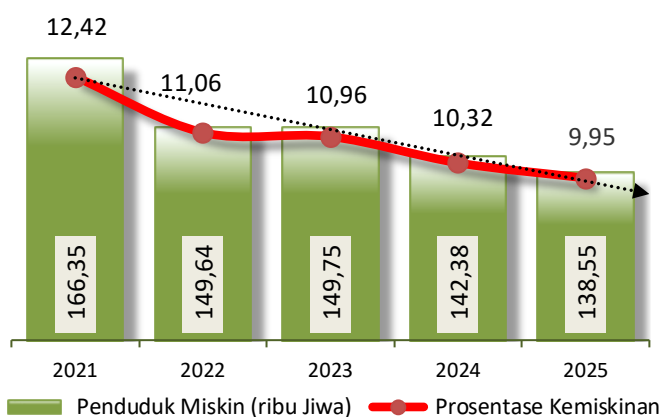
Sumber: Publikasi BPS – data diolah.

terus meningkat. Dari Maret 2021 hingga Maret 2025, garis kemiskinan Kabupaten Gresik naik sebesar Rp. 129.655 yaitu dari Rp. 505.499 per kapita per bulan pada Maret 2021 menjadi sebesar Rp. 635.154 per kapita per bulan pada Maret 2025.

2.1.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin.

Seseorang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (pengeluaran) di bawah garis kemiskinan akan disebut sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada Maret 2025 adalah sebanyak 138,55 ribu orang, turun sebanyak 3,83 ribu orang dibandingkan jumlah penduduk miskin Maret 2024. Dengan demikian persentase penduduk miskin pada Maret 2025 adalah sebesar 9,95 persen atau menurun 0,37 persen poin terhadap Maret 2024.

Gambar 2.2
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Gresik, Tahun 2021-2025



Sumber: Publikasi BPS– data di olah

Selama tahun 2021-2025, perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik, keduanya menampilkan pola

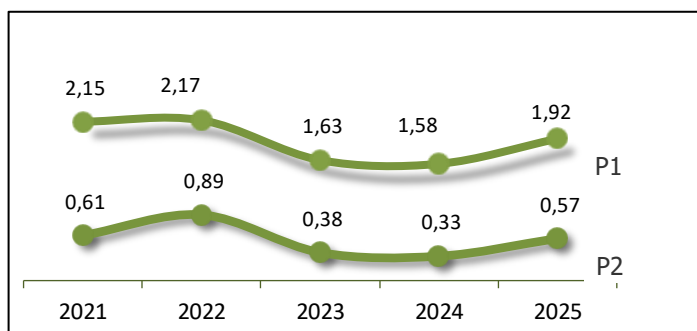
perkembangan antar waktu dengan kecenderungan tren menurun (membaik).

2.1.3. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gresik pada Maret 2025 adalah sebesar 1,92 mengalami kenaikan sebesar 0,34 poin jika dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2024. Sementara itu Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Gresik pada Maret 2025 adalah sebesar 0,57 mengalami kenaikan sebesar 0,24 poin dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2024.

Gambar 2.3
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Gresik, Tahun 2021-2025



Sumber: Publikasi BPS - data di olah

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Gresik selama tahun 2021-2025, menunjukkan perkembangan angka yang fluktuatif dengan tren yang cenderung menurun (membaik).

2.1.4. Kemiskinan Ekstrem.

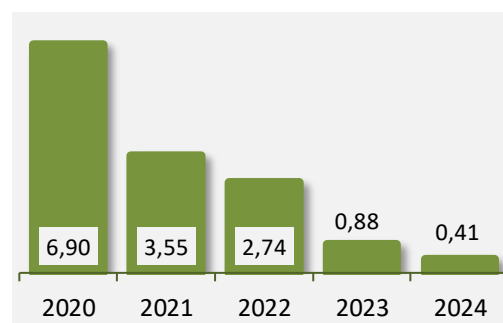
Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp 10.739,- per orang per hari atau Rp 322.170,- per orang per bulan.

Dengan kata lain, penduduk miskin ekstrem mempunyai pengeluaran lebih rendah dari penduduk miskin umum. Penduduk miskin umum memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Gresik tidak lebih dari Rp.

588.316,- sedangkan penduduk miskin ekstrem mempunyai pengeluaran per orang per bulan tidak lebih dari Rp. 322.170,-.

Persentase kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik pada tahun

Gambar 2.4
Perkembangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gresik, Tahun 2020-2024



Sumber: Publikasi BPS – data diolah.

2024 adalah sebesar 0,41 persen, turun sebesar 0,47 poin terhadap tahun 2023. Jika terhadap tahun 2020, dimana pertama kali ditetapkan perhitungan kemiskinan ekstrem (tahun 2020 kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik adalah sebesar 6,9%), maka hingga tahun 2024 Kabupaten Gresik telah mengalami penurunan angka kemiskinan ekstrem sebesar 6,49 persen poin.

2.2. Kondisi Capaian Indikator Bidang terkait Isu Kemiskinan.

Kondisi perkembangan capaian indikator-indikator bidang terkait isu kemiskinan (kemiskinan non konsumsi) yaitu bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Infrastruktur Dasar, dan bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir (tahun 2020-2024) adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Perkembangan Capaian Indikator Kemiskinan Non Konsumsi,
Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun (dalam %)				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bidang Pendidikan:					
APM SD/MI sederajat	98,82	99,37	97,39	97,66	97,10
APM SMP/MTs sederajat	83,29	83,91	84,67	81,73	91,53
APM SMA/SMK/MA sederajat	79,71	80,48	78,07	76,00	74,89
APT S SD/MI sederajat	3,25	1,87	0,27	0,16	0,06

Lanjutan tabel 2.1

Indikator	Capaian Tahun (dalam %)				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
APtS SMP/MTs sederajat	5,12	4,33	3,32	0,17	0,39
APtS SMA/SMK/MA sederajat	6,51	5,53	4,47	3,18	2,92
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,30	9,56	9,75	10,01	10,03
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,73	13,77	13,96	13,97	13,98
AMH Penduduk Usia 15 ⁺	97,28	97,20	98,03	98,39	98,33
Bidang Kesehatan:					
AKN per 1000 kelahiran hidup	2,51	3,26	4,10	4,60	3,80
AKB per 1000 kelahiran hidup	2,66	3,47	4,34	4,80	4,30
AKABA per 1000 kelahiran hidup	0,05	0,05	4,40	4,80	4,40
AKI per 100ribu kelahiran hidup	59,09	315,76	94,18	99,38	77,59
Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,17	0,14	0,20	0,20	0,29
Prevalensi Stunting	11,04	10,90	9,61	6,60	5,32
Imunisasi Dasar Lengkap	107,70	104,70	98,80	96,10	98,80
Usia Harapan Hidup (tahun)	73,66	73,67	73,96	74,24	74,48
Bidang Ketenagakerjaan:					
TPAK	66,53	69,43	68,30	70,12	71,61
TPT	8,21	8,00	7,84	6,82	6,45
Penduduk Idle	25,67	23,27	24,33	21,84	22,82
Bidang Infrastruktur Dasar:					
Akses Air Minum Layak	94,63	88,99	91,50	98,85	98,86
Akses Sanitasi Layak	93,15	91,56	90,29	94,10	93,87
Akses Listrik (PLN, non-PLN)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Status Bangunan Milik Sendiri	85,01	90,63	93,07	93,14	91,48
Rumah Tidak Layak Huni	19,75	28,70	28,00	27,90	17,14

Lanjutan tabel 2.1

Indikator	Capaian Tahun (dalam %)				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bidang Ketahanan Pangan:					
Produktivitas padi (ku/th)	4,43	4,59	6,60	3,67	2,90
<i>Prevalence of Underneorishment</i>	60,84	61,84	64,98	65,72	62,30
Rata² harga bahan pokok:					
▪ Beras	9.200	9.250	9.500	10.950	12.950
▪ Gula pasir lokal	12.000	12.000	12.750	16.400	16.845
▪ Minyak goreng curah	13.800	19.000	15.000	14.500	17.926
▪ Daging sapi lokal	99.500	99.500	102.500	102.200	107.143
▪ Daging ayam ras	32.750	36.500	34.500	35.750	36.336
▪ Telur ayam ras	23.750	22.750	30.000	26.950	27.462
▪ Cabai merah	37.500	36.750	27.500	80.400	28.622
▪ Bawang merah	35.000	20.750	34.750	31.200	39.517
▪ Bawang putih	25.750	25.500	22.750	35.000	39.849

Sumber: LP2KD Kab Gresik Tahun 2024

2.3. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Gresik telah meralisasikan APBD sebesar Rp 449.333.540.132,- untuk melaksanakan 50 program, 62 kegiatan, dan 110 sub kegiatan penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tersebut adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik dengan Sumber Biaya APBD Tahun Anggaran 2024

URUSAN PEMERINTAH BIDANG	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI				PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		P	K	SK	PEMBIAYAAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)			(4)	(8)
1.01 PENDIDIKAN	193.488.149.663	1	4	10	182.632.958.143	Dinas Pendidikan
1.02 KESEHATAN	169.495.780.094	2	2	22	163.892.822.394	Dinas Kesehatan
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	21.994.962.300	2	2	6	21.403.235.663	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.223.697.824	2	2	2	16.173.074.944	Dinas Cipta Karya dan PKP
1.05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	813.776.970	2	2	2	732.010.150	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06 SOSIAL	19.758.000.000	3	3	3	14.169.000.000	Dinas Sosial
2.07 TENAGA KERJA	3.468.028.695	3	3	4	3.010.387.176	Dinas Tenaga Kerja
2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	1.897.970.000	3	4	4	1.672.124.586	Dinas Keluarga Berencana, P3A
2.09 PANGAN	149.073.475	1	1	1	138.641.200	Dinas Pertanian
2.11 LINGKUNGAN HIDUP	237.220.750	1	1	1	216.358.237	Dinas Lingkungan Hidup
2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	427.586.800	4	4	7	278.375.100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.304.991.154	3	3	6	3.873.643.556	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KE;UARGA BERENCANA	3.333.000.000	1	1	1	3.329.370.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A
2.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	418.000.000	1	1	2	416.463.721	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	862.500.000	2	2	4	439.795.162	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
2.18 PENANAMAN MODAL	216.748.000	1	1	1	134.518.525	Dinas Penanaman Modal PTSP
2.20 STATISTIK	197.931.181	1	1	2	173.306.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 KEBUDAYAAN	319.275.000	1	1	1	316.919.491	Dinas Pariwisata Ekrup, Budpora
2.23 PERPUSTAKAAN	74.088.000	1	1	1	74.088.000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.556.836.925	3	6	10	3.466.384.882	Dinas Perikanan
3.26 PARIWISATA	904.324.470	3	4	4	666.737.122	Dinas Pariwisata Ekrup, Budpora

Lanjutan tabel 2.2

URUSAN PEMERINTAH BIDANG	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI				PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		P	K	SK	PEMBIAYAAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)			(4)	(8)
3.27 PERTANIAN	25.998.933.946	4	4	6	24.447.216.272	Dinas Pertanian
3.30 PERDAGANGAN	100.000.000	1	1	1	60.219.660	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
3.31 PERINDUSTRIAN	75.000.000	1	1	1	45.506.046	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	7.695.399.894	1	1	1	6.723.765.600	Sekretariat Daerah, Bagian Kesra
5.01 PERENCANAAN	855.811.820	1	3	4	640.095.842	Bappeda Litbang
7.01 KECAMATAN	208.631.712	1	3	3	206.522.160	Kecamatan
JUMLAH	481.075.718.673	50	62	110	449.333.540.132	

Keterangan: P = Program
K = Kegiatan
SK = Sub Kegiatan

Sumber: LP2KD Kabupaten Gresik Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah



KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN BERJALAN

dokumen

RAT PK 2026 Kab. Gresik

BAB III

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN BERJALAN

3.1. Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, Pemerintah Indonesia diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8,0 persen yang dilandasi dengan stabilitas ekonomi makro yang kuat. Dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut, *Gross National Income* per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD 8.000 pada tahun 2029. Berdasarkan target/sasaran besar pembangunan selama lima tahun ke depan, maka kebijakan ekonomi makro akan didukung kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural yang adaptif.

Di samping itu, perbaikan kualitas pembangunan akan menjadi modal bagi Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 3.1
Sasaran Makro Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029



Sumber: RPJMN 2025-2029. Bappenas, 2025

Pertumbuhan inklusif dicerminkan melalui penurunan tingkat kemiskinan, dan rasio gini sebagai indikator ketimpangan, seiring dengan peningkatan Indeks Modal Manusia yang dicapai melalui pemenuhan gizi dan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi tinggi juga memerhatikan aspek keberlanjutan lingkungan antara lain melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai sumber-sumber pertumbuhan baru untuk mencapai target penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan

penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

dengan menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam menentukan sasaran program, termasuk program sekolah rakyat, yang berkaitan dengan strategi kebijakan. Target pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju 0% dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pemerintahan, sedangkan untuk kemiskinan relatif di targetkan di bawah 5% di akhir tahun 2029.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, pada pasal 16 dinyatakan bahwa Kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program.

Adapun strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana disebutkan pada pasal 17 adalah:

- (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- (2) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- (3) pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- (4) sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan sebagaimana tertuang pada pasal 18 Permendagri No. 53 Tahun 2020 adalah:

- (1) program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- (2) program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- (3) program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.



Sedangkan sasaran penerima manfaat dari Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan (Permendagri No 53/2020, pasal 19).

Berdasarkan uraian di atas dan dalam era desentralisasi ini, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama yang menentukan keberhasilan percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, terutama melalui perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan dalam menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menegaskan bahwa penguatan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai komponen penting di daerah dalam proses pembangunan telah dikenali sebagai pendekatan kunci dalam pencapaian perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada rakyat miskin.

Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut diperlukan sumber daya dan kapasitas dalam merencanakan program dan kegiatan yang secara spesifik dapat berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Diantaranya melalui kegiatan yang mencakup

bantuan-bantuan sosial ekonomi, perbaikan akses dan kesempatan bagi masyarakat miskin dan rentan untuk menerima layanan pendidikan dan kesehatan, kebijakan pengembangan infrastruktur dan keterampilan bagi angkatan kerja. Dalam memahami permasalahan kemiskinan baik pemerintah nasional dan daerah perlu mempertimbangkan perkembangan sosial, ekonomi, politik yang terjadi. Jika dibutuhkan pemrograman ulang atau *refocusing* prioritas program perlu dilakukan demi tercapainya hasil yang diinginkan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan.

Kelembagaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan juga perlu dipertegas dan didorong efektivitasnya. Meskipun kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan secara holistik dan lintas sektor, tetapi saat ini terdapat beberapa institusi yang dimandatkan untuk mengambil peran terdepan dalam mengkoordinir upaya pengurangan kemiskinan di tingkat pusat maupun daerah. Seperti contohnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang sudah dibentuk sejak tahun 2011 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 yang memiliki mandat sebagai koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Struktur organisasi TKPK di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 perlu dukungan penuh agar efektivitas program percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah dapat tercapai dan terukur. TKPK harus diperkuat agar dapat memegang kendali dalam perumusan program penanggulangan kemiskinan yang diusulkan oleh masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan memiliki peran dalam memantau kemajuan dan pencapaian program-program kemiskinan. TKPK juga harus diberdayakan untuk dapat menjalankan fungsinya dalam melakukan pengumpulan dan validasi data terkait kemiskinan yang dibutuhkan bagi pembangunan yang *pro-poor* (optimalisasi fungsi dan peran Pokja Pendataan dan Sistem Informasi pada TKPK). Selain itu TKPK diharapkan dapat mendorong kerjasama dan koordinasi antar OPD dalam halnya pengumpulan data dan melakukan analisa kemiskinan sebagai masukan perumusan kebijakan dan perencanaan serta penganggaran yang berpihak bagi masyarakat miskin.

3.2. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana disebutkan pada pasal 17 Permendagri No. 53/2020, adalah:

- (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;

- (2) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- (3) pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- (4) sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk strategi ke satu, yaitu *"mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin"*, hal mendasar yang perlu dilakukan adalah (1) *penyempurnaan dan perbaikan sistem perlindungan sosial yang komprehensif*, (2) *perluasan dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar*, serta (3) *pengurangan kesenjangan antar penduduk maupun kelompok*. Untuk strategi kedua dengan *peningkatan daya saing kegiatan ekonomi produktif*, sedangkan pada strategi ketiga adalah dengan *mengembangkan inovasi daerah program penanggulangan kemiskinan yang bernuansa pemberdayaan masyarakat dengan muatan pengembangan penghidupan berkelanjutan*.

Dalam rangka mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (strategi ke empat), maka *penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan* (dalam hal ini TKPK Kabupaten Gresik) adalah sebuah keniscayaan. Dua hal penting dalam penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan adalah: (1) *pe-*

nguatan Sekretariat TKPK dengan menyediakan peralatan dan personil kesekretariatan yang mumpuni dalam mengelola dan menyajikan data-data kemiskinan menjadi informasi yang up to date; dan (2) meningkatkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pelaku CSR (corporate social responsibility), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Media Massa melalui kemitraan dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

3.3 Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Gresik senantiasa melaksanakan upaya secara terus menerus untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mengentaskan dan mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun, maka Pemerintah memandang penting untuk melakukan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi pengeluarannya, Sehingga kemampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya semakin meningkat. Ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin (kedalaman dan keparahan

kemiskinan) juga merupakan permasalahan kemiskinan Kabupaten Gresik yang harus diminimalisasi selain menurunkan persentase dan jumlah penduduk miskin.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Gresik mengalokasikan anggaran dari sumber APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 535.321.792.166,- untuk membiayai 36 program, 46 kegiatan, dan 109 sub kegiatan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya disajikan rekapitulasi Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik untuk tahun 2025, sebagaimana terdapat pada dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik dengan Sumber APBD Tahun Anggaran 2025.

URUSAN PEMERINTAH BIDANG	JUMLAH			PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	P	K	SK		
(1)	(2)			(3)	(4)
1.01 PENDIDIKAN	1	4	17	147.980.046.827	Dinas Pendidikan
1.02 KESEHATAN	1	1	14	115.661.352.868	Dinas Kesehatan
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3	3	17	207.996.873.503	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	1	1	13.617.285.500	Dinas Cipta Karya Perumahan Permukiman
1.05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	3	3	776.186.912	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06 SOSIAL	4	6	16	11.076.842.028	Dinas Sosial
2.07 TENAGA KERJA	2	2	2	9.475.415.260	Dinas Tenaga Kerja
2.09 PANGAN	1	2	4	323.748.720	Dinas Pertanian
2.11 LINGKUNGAN HIDUP	1	1	1	167.311.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	1	1	12.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.15 PERHUBUNGAN	1	2	2	476.016.000	Dinas Perhubungan
2.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	1	2	56.717.600	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3	3	9	347.566.284	Dinas Koperasi Industri Perdagangan
2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	1	1	85.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga
2.20 STATISTIK	1	1	1	44.143.472	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 KEBUDAYAAN	1	1	1	75.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga
3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	3	4	1.167.856.791	Dinas Perikanan
3.26 PARIWISATA	2	2	2	258.414.964	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga
3.27 PERTANIAN	4	4	7	23.773.665.362	Dinas Pertanian
3.30 PERDAGANGAN	1	1	1	70.000.000	Dinas Koperasi Industri Perdagangan

Lanjutan table 3.1

URUSAN PEMERINTAH BIDANG	JUMLAH			PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	P	K	SK		
(1)	(2)			(3)	(4)
3.31 PERINDUSTRIAN	1	1	1	53.174.975	Dinas Koperasi Industri Perdagangan
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	1	1	1	1.545.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah
5.01 PERENCANAAN	1	1	1	282.174.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah	36	46	109	535.321.792.166	

Keterangan P = Program
 : K = Kegiatan
 SK = Sub Kegiatan

Sumber: RAT Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah



RENCANA AKSI TAHUNAN

dokumen

RAT PK 2026 Kab. Gresik

BAB IV

RENCANA AKSI TAHUNAN

4.1 Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Secara umum strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gresik pada tahun 2026 tetap mengacu pada strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana disebutkan pada pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020, yaitu: (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan (4) sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi ke satu, yaitu “mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin”, hal mendasar yang perlu dilakukan adalah (1) penyempurnaan dan perbaikan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, (2) perluasan dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, serta (3) pengurangan kesenjangan antar penduduk maupun kelompok. Untuk

strategi kedua dengan peningkatan daya saing kegiatan ekonomi produktif, sedangkan pada strategi ketiga adalah dengan pengembangan inovasi daerah program penanggulangan kemiskinan yang bernuansa pemberdayaan masyarakat dengan muatan pengembangan kehidupan berkelanjutan.

Dalam rangka mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (strategi ke empat), maka penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK Kabupaten Gresik) adalah sebuah keniscayaan. Dua hal penting dalam penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan adalah: (1) penguatan Sekretariat TKPK dengan menyediakan peralatan dan personil kesekretariatan yang mumpuni dalam mengelola dan menyajikan data-data kemiskinan menjadi informasi yang *up to date*; dan (2) meningkatkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pelaku CSR (*corporate social responsibility*), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Media Massa melalui kemitraan dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Implementasi strategi penanggulangan kemiskinan membutuhkan ketersediaan data terkait dengan indikator utama maupun indikator

pendukung hingga tingkat kecamatan sebagai alat ukur dalam pengendalian capaian-capaian hasil kebijakan dan program yang diupayakan selama ini dan masa yang akan datang.

Dan yang terpenting adalah perlunya peneguhan komitmen untuk memanfaatkan basis data yang telah tersedia secara nasional yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT SEN) dalam perencanaan program hingga implementasi upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga lebih fokus penerima manfaat dan fokus pada lokasi prioritas intervensi.

Sebagai pedoman umum pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, maka dirumuskan strategi operasional sebagai berikut:

- (1) Sasaran adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT SEN).
- (2) Menempatkan si miskin sebagai titik sentral pemberdayaan.
- (3) Menempatkan wilayah/kantong-kantong kemiskinan sebagai prioritas wilayah pengentasan kemiskinan.
- (4) Sumber pendanaan berasal dari pemerintah (APBN, APBD dan APBDes), CSR perusahaan, Masyarakat serta sumber lain yang tidak mengikat.

- (5) Bantuan sosial terpadu dan Pemberdayaan keluarga bagi rumah tangga dan individu sasaran agar mampu mandiri dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (6) Mendorong keberfungsian sumber-sumber layanan terdekat yang sangat dibutuhkan masyarakat miskin.
- (7) Mobilisasi keswadayaan masyarakat yang diarahkan dan berpihak pada penanganan kemiskinan: PKK, Perguruan Tinggi, LSM, Komunitas Sosial, Badan Amil Zakat dan Sedekah, Organisasi Sosial, dan lain-lain.
- (8) Membangun sinergi dengan stakeholder dan seluruh operator program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Gresik (PKK, PKH, Perguruan Tinggi, LSM, program-program lain dari Pemerintah Pusat dan Provinsi).

Hal yang perlu diperhatikan agar kerja penanggulangan kemiskinan dapat berjakan dan mencapai target sebagaimana di rencanakan adalah:

- (1) memperkuat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan berbagai regulasi yang dibutuhkan;
- (2) mewujudkan data tunggal kemiskinan sebagai satu-satunya sumber data pensasaran program melalui verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data penduduk miskin secara periodik; dan

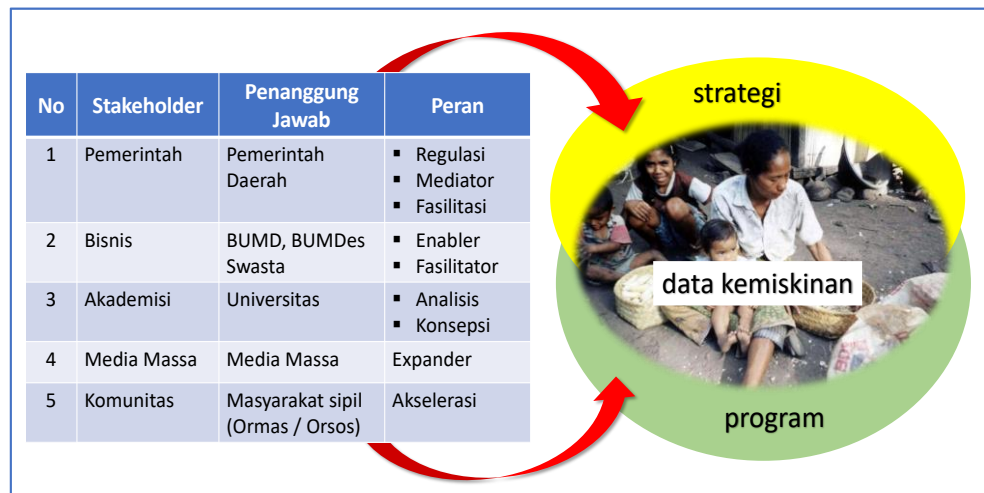
- (3) meningkatkan fungsi kolaboratif antara pemerintah dengan unsur-unsur non pemerintah (akademisi, dunia usaha/CSR, masyarakat/kelompok peduli, dan media) sebagai pendekatan *pentahelix* guna memperkuat modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan.

Konsep *Pentahelix* dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan suatu wilayah menjadi suatu persoalan yang seharusnya ditangani bersama-sama. Dalam suatu wilayah, selain sektor Pemerintah juga terdapat sektor selain pemerintah, yang apabila dikategorisasi dapat terdiri dari akademisi, bisnis, masyarakat sipil (organisasi kemasyarakatan), dan media. Ke empat sektor tersebut bersama Pemerintah dapat membentuk sebuah *pentahelix* sebagai gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.

Konsep *pentahelix* adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan lima sektor utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kelima sektor tersebut adalah pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat sipil, dan media. Dalam konsep *pentahelix*, setiap sektor memiliki peran penting dan saling bekerja sama untuk mengatasi masalah kemiskinan secara holistik.

Gambar 4.1

Konsep *Pentahelix* dalam Penanggulangan Kemiskinan

Peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah merancang kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan menjalankan program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi. Pemerintah juga bertanggungjawab dalam menciptakan regulasi yang mendukung pengurangan kemiskinan, seperti kebijakan pendidikan gratis, bantuan sosial, atau program pemberdayaan ekonomi.

Di sektor bisnis memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat miskin.

Melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja yang layak, mengembangkan rantai pasok yang inklusif, dan berinvestasi dalam pengembangan masyarakat.

Sedangkan akademisi berperan dalam penelitian, inovasi, dan pengembangan pengetahuan. Akademisi dapat melakukan penelitian tentang kemiskinan, menyediakan analisis kebijakan, serta menghasilkan solusi inovatif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Mereka juga dapat menyediakan pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengatasi kemiskinan.

Masyarakat sipil dapat berperan sebagai advokat dan pemangku kepentingan untuk memperjuangkan keadilan sosial, mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah, memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Sementara Media juga memiliki peran penting dalam mengadvokasi isu-isu kemiskinan, meningkatkan kesadaran publik, dan mengkampanyekan solusi. Media dapat memberikan informasi yang akurat tentang kondisi kemiskinan, menceritakan kisah-kisah yang memotivasi, dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mempersatukan (duduk bersama) antara kelima sektor dalam suatu *pentahelix* selain semangat bersama dalam gerakan penanggulangan kemiskinan, adalah adanya “data kemiskinan” yang terverifikasi dan tervalidasi.

Tentunya data tersebut bukanlah sekedar daftar nama dan alamat, tetapi berikut variabel-variabel penting lainnya (tentang pendidikan, kesehatan, pekerjaan/ketenaga kerjaan, kondisi rumah dan lain-lain), yang dapat menghasilkan informasi-informasi untuk dirumuskan strategi dan program penanganannya.

Melalui pendekatan *pentahelix*, semua sektor dapat bekerja sama, saling melengkapi, dan mengoptimalkan sumber daya dan keahlian masing-masing untuk mencapai tujuan bersama dalam penanggulangan kemiskinan.

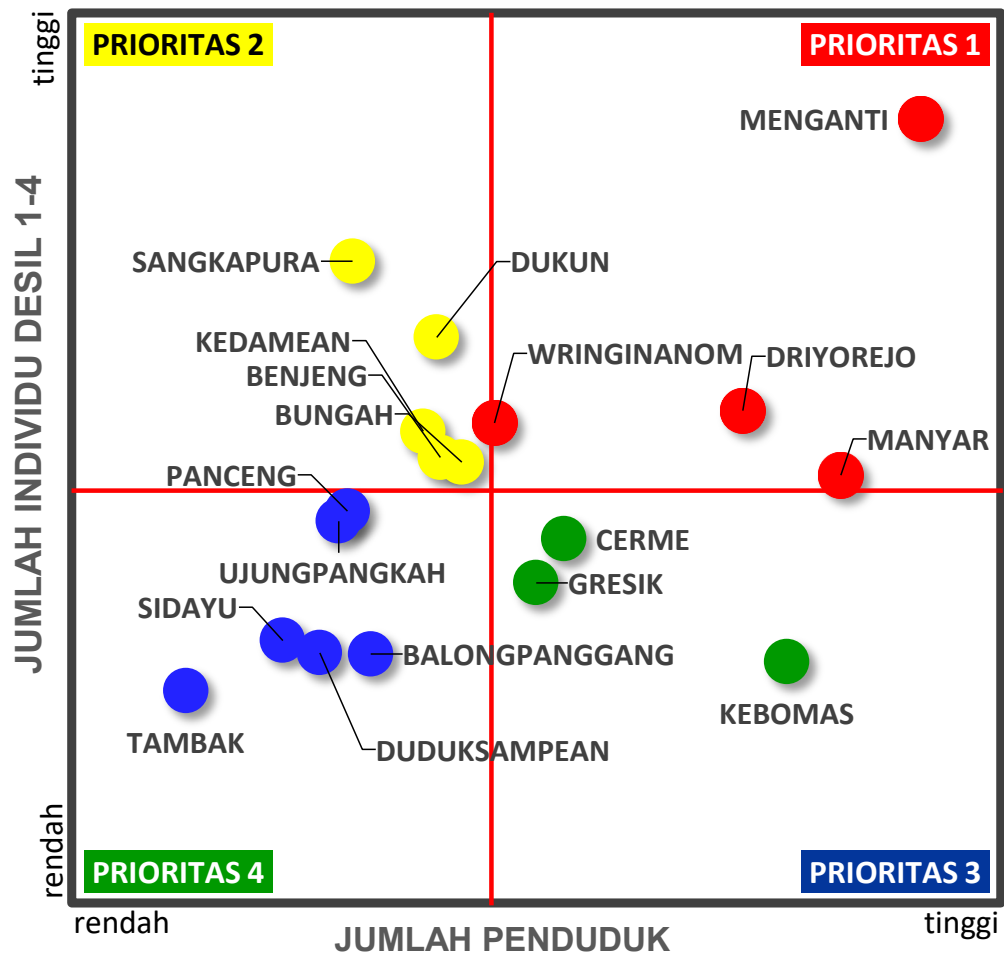
4.2 Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Lokasi prioritas bertujuan untuk menentukan wilayah kecamatan mana yang memiliki kondisi “kritis” (daerah prioritas) yang perlu segera mendapatkan intervensi (lokus intervensi) berdasarkan kondisi atau performance indikator utama dan indikator pendukung.

Dengan menggunakan analisis kuadran yang mempersandingkan antara jumlah penduduk sebagai indikator x dan jumlah individu miskin sebagai indikator y , maka akan diperoleh sebaran lokasi prioritas sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4.2

Sebaran Lokasi Prioritas berdasar Jumlah Individu Miskin

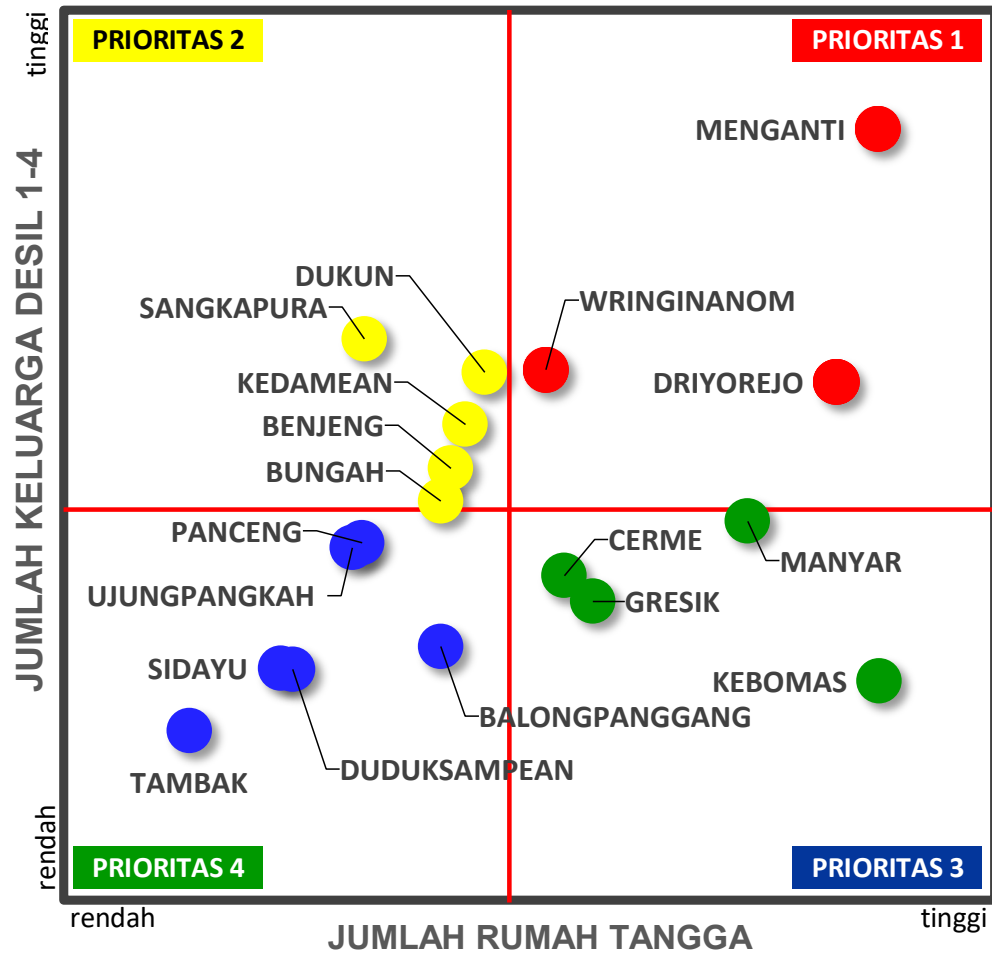


Sumber: BPS dan DT-SEN, di olah

Sementara itu dengan mempersandingkan antara jumlah rumah tangga sebagai indikator x dan jumlah keluarga miskin sebagai indikator y , maka akan diperoleh sebaran lokasi prioritas sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4.3

Sebaran Lokasi Prioritas berdasar Jumlah Keluarga Miskin



Sumber: BPS dan DT-SEN, di olah

4.3 Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan (RAT PK) Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan serangkaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penanggulangan kemiskinan di tahun 2026.

Matriks RAT PK Kabupaten Gresik Tahun 2025 disajikan berdasar bidang-bidang urusan pemerintahan dengan nomenklatur merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1373 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Matriks Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan ini secara sekilas nampak sama dengan program dan kegiatan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Program, kegiatan yang dipilih merupakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang mendukung penanggulangan kemiskinan. Dan yang terpenting dalam rencana aksi ini bukan hanya sekumpulan programnya, tetapi adalah target sasaran penerima manfaat program yang haruslah terpusat (konvergen) pada data kemiskinan (BNBA) yang telah dimiliki yang terverifikasi dan tervalidasi secara periodik.

Selanjutnya secara lebih detil disajikan tabel/matriks Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2026 dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut.

Tabel 4.1 Matriks Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2026
(sumber pembiayaan dari APBD Tahun Anggaran 2026)

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01	Bidang PENDIDIKAN			386.516.236.259	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			386.516.236.259	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	pemberian BOS Sekolah Dasar pelaksanaan SPMB sesuai dg juknis pusat perbaikan dan pemeliharaan ruang kelas di setiap lembaga yg mengalami kerusakan sedang hingga berat pemberian BOS Daerah jenjang Sekolah Dasar	467 satuan pendidikan 389 satuan pendidikan 147 unit 450 siswa	176.950.650.059	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			106.254.628.400	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			200.000.000	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			27.900.671.659	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			42.595.350.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	perbaikan dan pemeliharaan ruang kelas disetiap lembaga yg mengalami kerusakan sedang hingga berat pemberian BOS Daerah jenjang SMP pemberian BOS Sekolah Menengah Pertama	52 unit 36.654 siswa 163 satuan pendidikan	113.397.656.200	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			11.671.000.000	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			37.315.720.000	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			64.278.797.600	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	pelaksanaan SPMB sesuai dengan juknis pusat	35 satuan pendidikan	132.138.600	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	pemberian BOP PAUD	65.389 siswa	53.802.600.000	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			15.693.360.000	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	pemberian BOSP PAUD	1.455 satuan pendidikan	38.109.240.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	pemberian BOP Kesetaraan, TPA /TPQ/Madin, Pondok Pesantren dan bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	173.088 peserta didik	42.365.330.000	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			39.677.000.000	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non formal/Kesetaraan	pemberian BOSP kesetaraan	13 satuan pendidikan	2.626.330.000	
1.02	Bidang KESEHATAN			136.701.942.697	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			136.701.942.697	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			136.701.942.697	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	pelayanan antenatal yg memenuhi 10T dan pelayanan ultrasonografi.	16.356 ibu hamil	1.019.111.164	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	melaksanakan APN (Acuan Persalinan Normal) sesuai standar	16.356 ibu melahirkan	52.298.750	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	pelayanan neonatal esensial saat lahir dan setelah lahir	16.124 bayi	876.541.884	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak	74.457 balita	2.808.439	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	skrining kesehatan anak usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS, dan pondok pesantren, dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya	189.670 siswa	185.303.611	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		887.527 orang	5.537.680	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	layanan skrining faktor risiko pada usia lanjut, 1x setahun	173.403 orang	200.241.698	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	layanan Kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	98.246 orang	13.282.515	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	layanan Kesehatan penderita diabetes sesuai standar	47.366 orang	12.628.427	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg Gangguan Jiwa Berat	melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi, pemeriksaan status mental, wawancara, edukasi kepatuhan minum obat pada pasien dan keluarga caregiver, tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat	2.565 orang	115.699.821	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	penetapan sasaran orang terduga TB menggunakan data yg ditetapkan Kepala Daerah sesuai target/perkiraan Kementerian, pemeriksaan orang dg gejala TB serta pelacakan/pemeriksaan kontak skrining secara masal terutama pada kelompok rentan/berisiko serta pd kondisi situasi khusus, pemeriksaan klinis, penunjang,	19.299 orang	130.811.807	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg Risiko Terinfeksi HIV	dan lanjutan orang terduga TB, memberikan rujukan bila diperlukan, serta edukasi perilaku dan pencegahan penularan.	22.047 orang	20.444.144	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	edukasi perilaku dan pencegahan penularan, pemeriksaan tes cepat HIV, dan rujukan	74.457 balita	4.818.815.177	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 dokumen	1.268.509.499	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		2.581 orang	21.131.818	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		orang	1.913.433.213	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		1.528.427 orang	126.010.438.760	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			34.904.290	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			188.759.114	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.03	Bidang PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			24.477.154.047	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			15.593.978.917	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			15.593.978.917	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		2 liter/detik	1.266.747.337	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		770 SR	14.327.231.579	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			8.883.175.129	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			8.883.175.129	
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		160 m ³ /hari	8.678.422.170	
1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		0,4 m ³ /hari	53.972.002	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		355 RT	150.780.957	
1.04	Bidang PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			28.170.027.318	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Ka- wasan Permukiman
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			125.788.800	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			25.788.800	
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	identifikasi lahan yang potensial Sebagai; lokasi relokasi perumahan	2 dokumen	12.894.600	
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	identifikasi rumah di lokasi rawan bencana	1 dokumen	12.894.200	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			100.000.000	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		50 unit rumah	100.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			14.148.945.668	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			20.905.600	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	melakukan pembinaan/so-sialisasi Kelompok Swadaya Masyarakat di permukiman kumuh	39 orang	20.905.600	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			14.128.040.068	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			7.302.664.454	
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh			197.008.816	
1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			6.326.829.081	
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh		6 ha	301.537.568	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			13.895.293.000	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		6 lokasi	13.895.293.000	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			13.895.293.000	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.05	Bidang KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			816.424.850	Badan Penanggu- langan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			816.424.850	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			38.060.100	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabu- paten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	▪ pengadaan dan pemasang an rambu kebencanaan ▪ sosialisasi, dan edukasi ke lompok rentan dan difabel di kawasan rawan bencana	5 unit 60 orang	38.060.100	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			153.078.500	
1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	pelatihan keluarga tanggap bencana alam	40 keluarga	17.456.000	
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi	rapat koordinasi jenis bencana yg dibuatkan dokumen Renkon kab/Kota	1 kali	1.050.000	
1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	pembuatan dokumen Renca- na Penanggulangan Kedaru- ratan Bencana (RPKB)	1 dokumen	134.572.500	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			625.286.250	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	pengadaan logistik bahan makanan	2.500 orang	625.286.250	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06	Bidang SOSIAL			19.275.456.123	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			3.236.971.852	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			3.236.971.852	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	▪ pelaksanaan bimbingan teknis akreditasi LKS; ▪ pelaksanaan monitoring dan evaluasi survei LKS; ▪ penyaluran bansos Marbot Guru Ngaji dan Penjaga Makam; ▪ pelaksanaan sosialisasi dan biaya operasional lainnya Sekolah Rakyat; ▪ pemberian hibah uang pada Karang Taruna dan LKS.	85 orang 20 kali 9100 orang 100 orang 5 lembaga	3.236.971.852	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			4.935.621.381	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			4.708.466.327	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	pemberian bantuan alat bantu penyandang disabilitas	20 orang	191.558.500	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	▪ penyaluran bansos anak yatim & janda miskin; ▪ penyediaan perlengkapan untuk shelter; ▪ penanganan respon kasus PPKS; ▪ pelaksanaan program BEKALKU; ▪ pemberian layanan psikologi ringan bagi PPKS; ▪ pembiayaan anak & lansia terlanter dalam panti; ▪ pelaksanaan pendataan PPKS; ▪ pelaksanaan koordinasi & evaluasi penyaluran bantuan sosial bersumber APBN; ▪ pembentukan program layanan lansia terintegrasi.	1.7160 orang 15 15 6 108 21.600 4 32	4.401.945.527	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia	▪ pelaksanaan evaluasi akhir tahun & RDP Program Pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;	60 orang	34.921.250	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06.04.2.01.0008	Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	▪ pemberian pelatihan reha bilitasi sosial vokasional; ▪ pelaksanaan sosialisasi program pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.	orang 20 orang 60		
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	▪ pemberian layanan pendi- dikan bagi PPKS; ▪ pemberian layanan keseha- tan (psikologi) bagi PPKS.	24 orang 18 orang	24.807.000	
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Rujukan	▪ Pemberian biaya perawat- an lansia terlantar; ▪ pemberian layanan kursus singkat bagi PPKS di UPT. PSBR.	24 orang 3 orang	55.234.050	
1.06.04.2.02.0007	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			227.155.054	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Kedaruratan	pemberian layanan kedaru- ratan bagi klien PPKS.	100 orang	100.000.000	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial klien PPKS.	50 orang	55.014.527	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	pemberian layanan rujukan bagi klien PPKS.	90 orang	72.140.527	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			10.787.908.050	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	pemberian permakanan anak terlantar	90 orang	100.000.000	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			100.000.000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	pemutahiran data aplikasi DTSEN ▪ penyaluran bantuan sosial DBHCHT; ▪ pemberian tali asih pendam ping PKH; ▪ penyaluran bantuan sosial PKH Inklusif. pengelolaan data fakir miskin	221.897 orang	10.687.908.050	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		52.792.800		
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		3608 orang	10.592.621.675	
			149 orang		
		1128 orang			
1.06.05.2.02.0008	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.000 usulan	42.493.575		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			314.954.840	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	layanan dukungan psikoso sial bagi korban bencana.	1.200 orang 59 orang 136 orang	314.954.840	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			250.000.000	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus Kelompok Rentan			40.800.000	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial			24.154.840	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.07	Bidang TENAGA KERJA			4.687.004.169	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			3.531.761.400	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			3.531.761.400	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			3.531.761.400	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			782.987.950	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kab/Kota			594.271.950	
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja			438.736.000	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			155.535.950	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			5.220.000	
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			5.220.000	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota			183.496.000	
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan PMI Purna Penempatan			183.496.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			372.254.819	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab./Kota			372.254.819	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			372.254.819	
2.09	Bidang PANGAN			2.560.042.400	Dinas Pertanian
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			185.770.400	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			145.678.400	
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			90.973.012	
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kab/kota			16.989.839	
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan			37.715.549	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/thn sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			40.092.000	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			40.092.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			2.374.272.000	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			33.840.000	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			33.840.000	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			2.340.432.000	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota			2.340.432.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11	Bidang LINGKUNGAN HIDUP			1.757.068.429	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			1.757.068.429	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			167.311.000	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	pembinaan dan sosialisasi (seperti Gerakan Kawasan Merdeka Sampah, Bank Sampah)	20 kelompok masyarakat	167.311.000	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	penyediaan sarana prasarana persampahan seperti tong sampah, kendaraan pengangkutan sampah, kendaraan pengolahan sampah, dan sejenisnya, pembangunan/ peningkatan TPST	23 unit	1.589.757.429	
2.12	Bidang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			467.218.800	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			166.386.800	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			166.386.800	
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	jemput bola pelayanan penduduk rentan; sosialisasi pada masyarakat berkaitan dengan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan;	99,39% Perekaman KTP-el 470 dok. Penduduk non permanen dan rentan	74.848.800	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	jemput bola di sekolah/disabilitas/ODGJ/orang sakit berkaitan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; percepatan pelayanan administrasi kependudukan; tersedianya dokumen pendaftaran penduduk terkini.		91.538.000	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			57.960.800	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			57.960.800	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	koordinasi dan evaluasi pe- layanan online di Desa/Pus- kesmas/RS		31.262.000	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	sosialisasi percepatan akta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan		26.698.800	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			168.551.600	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			168.551.600	
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	koordinasi dan pembinaan pelayanan tentang validasi perjanjian kerjasama admi- nistrasi kependudukan		18.060.000	
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	dokumen arsip yg dialih mediakan, fumigasi arsip;		106.202.000	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	monitoring perangkat lunak SIK; jemput bola pelayan- an IKD		44.289.600	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			74.319.600	
2.12.05.2.01 2.12.05.2.01.0001	Penyusunan Profil Kependudukan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	jemput bola pemutakhiran data kependudukan di kepulauan Bawean dan Gresik daratan		74.319.600 69.048.000	
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	menyusun dokumen Profil Kependudukan	98% validasi data ganda, anomali	5.271.600	
2.14	Bidang PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			351.600.000	Dinas Keluarga Berencana dan P3A
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota			351.600.000	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			60.000.000	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			291.600.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			14.742.431.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			14.742.431.000	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1.410.431.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			6.666.000.000	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			6.666.000.000	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			3.030.000.000	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			3.636.000.000	
2.15	Bidang PERHUBUNGAN			1.301.505.100	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			497.744.100	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang			497.744.100	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.15.02.2.09.0003	Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			497.744.100	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			217.526.300	
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			217.526.300	
2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			217.526.300	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			586.234.700	
2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal			586.234.700	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.16	Bidang KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			4.724.518.800	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			4.724.518.800	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota			4.724.518.800	
2.16.02.2.01.0014	Ralasi media	aktivitas relasi media pada media yg memenuhi kriteria sebagai berikut: terverifikasi dewan pers, terdaftar di Dinas Kominfo, aktif dalam kegiatan relasi media.	1 laporan	3.247.922.000	
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	komunitas informasi aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo.	6 komunitas	34.367.500	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	permohonan informasi pu- blik yg diselesaikan sesuai peraturan perundangan.	1 permohonan	25.965.500	
2.16.02.2.01.0019	Monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik	rekomendasi komunikasi thdp isu publik yg berkem- bang dan usulan agenda ko munikasi prioritas Pemerin- tah Daerah.	3 rekomendasi	574.040.000	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	media komunikasi publik milik pemerintah daerah yg dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis.	2 media	820.528.300	
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan konten	konten informasi publik.	1.675 konten	21.695.500	
2.17	Bidang KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			288.803.148	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			165.508.098	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yg Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			165.508.098	
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	membuat perizinan merk bagi pelaku usaha		25.000.000	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			135.868.098	
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro			4.640.000	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			63.295.050	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			63.295.050	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	pelatihan keterampilan 2 kegiatan		63.295.050	
3.25	Bidang KELAUTAN DAN PERIKANAN			998,796.961	Dinas Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			494.607.078	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota			72.222.800	
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	sosialisasi penggunaan alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan fasilitasi penyediaan prasarana usaha penangkapan ikan	20 unit	72.222.800	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota			422.384.278	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	pemberian bantuan bahan pokok bagi nelayan pd saat musim barat; sosialisasi keselamatan kerja di laut	100 orang	399.879.100	
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	sosialisasi dan pendampingan penumbuhan kelompok & pengembangan korporasi nelayan	1 kelompok	22.505.178	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			167.782.494	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	pembinaan teknis budidaya untuk pembudidaya Ikan kecil bimbingan Teknis Ikan/udang dan praktik kulbagiri serta pemberian contoh bahan (probiotik) pembudidaya ikan/udang	10 kelompok	54.832.450	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			29.516.600	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		10 kelompok	25.315.850	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	desiminasi budidaya udang (pembinaan sekaligus pemberian benih udang), pendampingan teknis untuk pembangunan infrastruktur perikanan desiminasi budidaya rumput laut dan bandeng (pembinaan dan pemberian bibit rumput laut dan benih bandeng)	3 unit	112.950.044	
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			36.222.000	
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		100 Unit	76.728.044	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			336.407.389	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			46.922.600	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.25.06.2.01.0002	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penyerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	sosialisasi dan pembinaan pada pelaku usaha perikanan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	200 pelaku usaha	46.922.600	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota	kegiatan sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	200 anak	289.484.789	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota			163.032.600	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota			126.452.189	
		- kegiatan pelatihan peningkatan produksi pelaku usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; - pemberian bantuan hibah barang pada kelompok pengolahan dan pemasar hasil perikanan	175 pelaku usaha		
			1 kelompok		
3.26	Bidang PARIWISATA			578.395.400	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			66.907.100	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			66.907.100	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	pelatihan BNSP terhadap Kelompok sadar wisata untuk menarik wisatawan datang ke tempat wisata dan memberikan fasilitas yang nyaman dan lengkap pd para pengunjung	40 Orang	66.907.100	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			210.208.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			210.208.000	
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	memberikan honor terhadap pengelola data kunjungan wisata, sosialisasi untuk meningkatkan pengunjung wisata sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar	50 Orang	135.208.000	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	mengadakan festival bandar grissee untuk memfasilitasi para pelaku usaha dalam mempromosikan usahanya	25 Orang	75.000.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			301.280.300	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			191.280.300	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	pameran untuk pelaku ekonomi kreatif (sebagai wadah pelaku ekraf untuk menampilkan kreatifitasnya) sehingga bisa menambah pendapatan	60 Orang	191.280.300	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			110.000.000	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	pelatihan BNSP untuk Pelaku Ekraf	20 Orang	110.000.000	
3.27	Bidang PERTANIAN			15.011.930.565	Dinas Pertanian
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			7.512.867.900	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			7.301.313.300	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			1.060.044.338	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			6.241.268.962	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			211.554.600	
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			211.554.600	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			5.310.688.755	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			497.533.200	
3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan			497.533.200	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			4.813.155.555	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			4.813.155.555	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			915.955.436	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			915.955.436	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			77.872.885	
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			838.082.551	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			1.272.418.474	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			1.272.418.474	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			1.272.418.474	
3.30	Bidang PERDAGANGAN			222.580.036	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			150.768.963	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			150.768.963	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			150.768.963	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			71.811.073	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota			71.811.073	

Lanjutan table 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	TARGET SASARAN (jumlah / satuan)	PAGU ANGGARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			71.811.073	
3.31	Bidang PERINDUSTRIAN			63.087.659	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			63.087.659	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			63.087.659	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			63.087.659	
4.01	Bidang SEKRETARIAT DAERAH			2.850.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			2.850.000.000	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			2.850.000.000	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	beasiswa pada mahasiswa kurang mampu, masyarakat berprestasi, hafidz, dan disabilitas	150 orang	2.850.000.000	

Sumber: Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

Tabel 4.2 Rekapitulasi Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2026
(sumber pembiayaan dari APBD Tahun Anggaran 2026)

URUSAN PEMERINTAH BIDANG	JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	P	K	SK		
(1)	(2)			(3)	(4)
1.01 PENDIDIKAN	1	4	13	386.516.236.259	Dinas Pendidikan
1.02 KESEHATAN	1	1	19	136.890.701.811	Dinas Kesehatan
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2	2	5	24.477.154.047	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	5	9	28.170.027.318	Dinas Cipta Karya Perumahan Permukiman
1.05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	3	5	816.424.850	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06 SOSIAL	4	6	16	19.275.456.123	Dinas Sosial
2.07 TENAGA KERJA	3	5	6	4.687.004.169	Dinas Tenaga Kerja
2.09 PANGAN	2	4	6	2.560.042.400	Dinas Pertanian
2.11 LINGKUNGAN HIDUP	1	1	2	1.757.068.429	Dinas Lingkungan Hidup
2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	4	4	9	467.218.800	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	5	8.428.031.000	Dinas Keluarga Berencana dan P3A
2.15 PERHUBUNGAN	2	3	3	1.301.505.100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	1	6	4.724.518.800	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2	2	4	228.803.148	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	6	10	998.796.961	Dinas Perikanan
3.26 PARIWISATA	3	4	5	578.395.400	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga
3.27 PERTANIAN	4	6	8	15.011.930.565	Dinas Pertanian
3.30 PERDAGANGAN	2	2	2	222.580.036	Dinas Koperasi Industri Perdagangan
3.31 PERINDUSTRIAN	1	1	1	63.087.659	Dinas Koperasi Industri Perdagangan
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	1	1	1	2.850.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah
Jumlah	42	61	135	640.024.982.875	

Sumber: Perangkat Daerah Kab. Gresik



PENUTUP

dokumen

RAT PK 2026 Kab. Gresik

BAB V

PENUTUP

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang mendesak dan memerlukan upaya penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Upaya tersebut perlu diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat untuk menempuh kehidupan yang bermartabat. Besar dan beratnya beban penanggulangan kemiskinan memerlukan dukungan kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan penanggulan kemiskinan.

Memperhatikan kondisi dimaksud, pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas kebijakan pembangunan. Agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat lebih terarah, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyusun rumusan kebijakan tersebut dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) berikut Rencana Aksi Tahunan (RAT). Diharapkan dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi salah satu cara yang tepat dan terarah

dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan peran penanggulangan kemiskinan di daerah.

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan ini diharapkan juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu dokumen ini perlu diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD ataupun dalam Renja OPD.

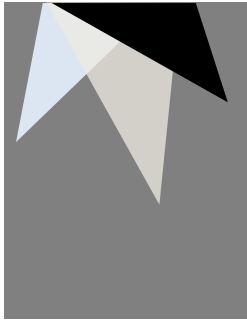
Sejalan dengan 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, implementasi RAT ini perlu dilakukan dan didukung melalui sinergitas program dan anggaran dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur DPRD, masyarakat maupun swasta.

Seluruh pemangku kepentingan perlu merespon RAT ini dengan melakukan hal yang sama untuk menjamin sinergitas dan implementasi serta pencapaian target penurunan angka kemiskinan sesuai dengan kewenangannya. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dalam koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.



- halaman ini sengaja dikosongkan -





daftar pustaka

Badan Pusat Statistik. 2011. Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2025. Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2024. Jakarta: BPS

Badan Pusat Statistik. 2024. Statistik Kesejahteraan Rakyat - Welfare Statistics - 2024. Jakarta: BPS

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2024. Statistik Kesejahteraan Rakyat kabupaten Gresik 2024. Gresik: BPS.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2025. Kabupaten Gresik Dalam Angka 2025. Gresik: BPS.

Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. 2025. Profil Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2024. Gresik: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. 2025. Profil Pendidikan Tahun 2024. Gresik: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. Buku III – Alat Analisis Tepat Guna untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin. Jakarta: Bappenas.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2010. Panduan Praktis Analisis Data untuk Mendukung Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: TNP2K.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2012. Panduan pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan - Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, cetakan pertama. September 2012. Jakarta: TNP2K.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2014. Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD. Jakarta: TNP2K.

Draf Final Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020.

-----, <https://www.bdt.tnp2k.go.id>

-----, <https://www.bps.go.id>

-----, <https://www.jatim.bps.go.id>

-----, <https://www.Gresikkab.bps.go.id>

-----, <https://www.kemdikbud.go.id>

-----, <https://www.kemkes.go.id>

-----, <https://www.siskaperbapo.com/harga/tabel>



